

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam rangka kerjasama bilateral AS-Indonesia dalam masalah pertahanan keamanan, sejak tahun 1960-an hingga awal 1980-an, AS telah memberikan pinjaman impor senjata kepada militer Indonesia. Sejak tahun 1994 sampai tahun 1995 nilai impor persenjataan Indonesia dari AS senilai US\$ 170 juta.⁵⁷

Meskipun demikian, hubungan baik AS-Indonesia di bidang pertahanan keamanan di atas pada kenyataannya bukan tanpa konflik. Hubungan kedua negara yang pada awalnya relatif lancar, mulai dihadapkan pada permasalahan yang terkait erat dengan situasi keamanan yang terjadi di Timor-Timur pasca jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1990.

Kekacauan yang ditimbulkan oleh kelompok pro-integrasi di Timor-Timur, dianggap oleh AS menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Bahkan pemerintah Indonesia dituduh dan dipersalahkan atas apa yang terjadi pada krisis Timor-Timur pasca jajak pendapat tersebut. Selain dinilai berpihak pada kelompok pro-integrasi, pemerintah Indonesia juga dianggap bertindak lamban dan tidak mampu menyelesaikan kekacauan politik dan keamanan di Timor-Timur.

Karenanya, pemerintah Amerika Serikat Melalui menteri Pertahanan dan Keamanan waktu itu, William Cohen, pada tanggal 9 September 1999 menjatuhkan embargo militernya berupa penghentian program IMET (International Military Education and Training) untuk

perwira militer Indonesia, pelarangan penjualan berbagai jenis senjata baik yang mematikan maupun tidak mematikan, suku cadang pesawat tempur serta non tempur dan peralatan militer lainnya ke Indonesia berdasarkan resolusi nomor 91 yang dikeluarkan oleh Kongres Amerika Serikat.

Namun, pada akhirnya kebijakan Amerika Serikatlah yang memutuskan untuk melakukan normalisasi kerjasama militer terhadap Indonesia sekaligus mengabaikan faktor penyebab dijatuhkannya embargo militer.

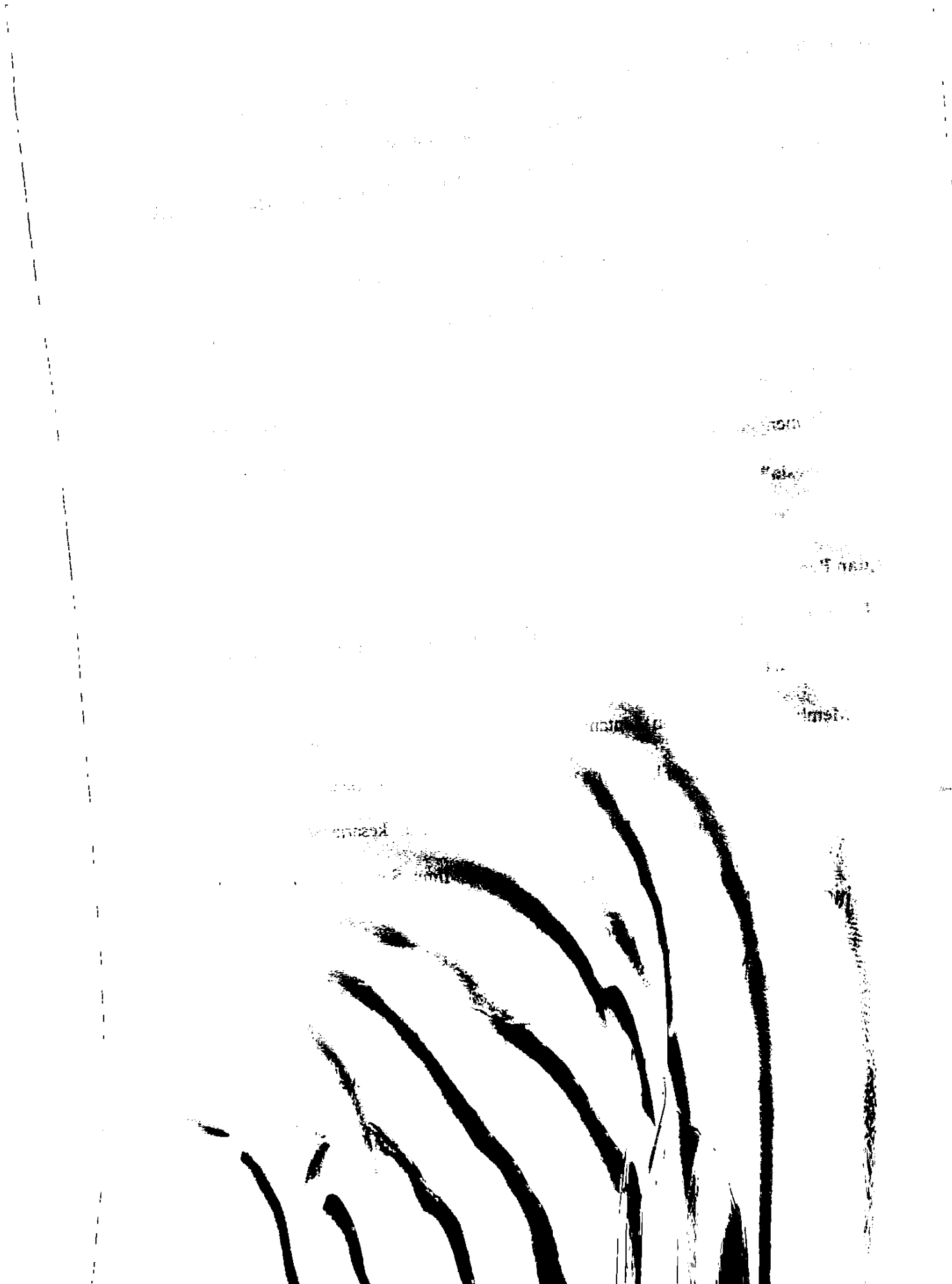
Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk mengulas permasalahan tersebut. Penulis menggunakan judul **"Kepentingan AS Terhadap Normalisasi Hubungan Militer AS-Indonesia"**

B. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui kepentingan Amerika Serikat dibalik normalisasi hubungan kerjasama militer AS-Indonesia
2. Memberikan penjelasan tentang faktor yang menyebabkan Amerika Serikat melakukan normalisasi kerjasama militer dengan pihak Indonesia.
3. Sebagai salah satu prasyarat guna memperoleh gelar kesarjanaan S-1, pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

WANG MASAHA
... mengenai Indonesia sebagai suatu tempat garis kepentingan
... bahwa Indonesia memiliki nilai strategis secara



ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. Pernyataan ini dirangkum oleh Presiden Truman, yaitu orientasi politik Indonesia akan mempengaruhi orientasi politik seluruh Asia.⁵⁸

Disamping itu, AS juga memandang Indonesia sebagai faktor penting dalam strategi pembendungannya waktu terjadi perang dingin. Indonesia tidak saja diukur dari sudut posisi wilayah yang strategis, potensi ekonomi, serta sumber-sumber bahan baku industri yang melimpah, tetapi juga dari kepastian bahwa Indonesia tetap berada dibawah kekuasaan pemerintahan nasional yang bersahabat dengan AS pada khususnya dan sekutu-sekutunya.

Kepentingan militer AS di Indonesia sebenarnya berkaitan dengan kepentingan dalam bidang politik serta ekonomi, yaitu adanya peningkatan kepentingan ekonomi dalam mempertahankan keberadaan militernya di kawasan Asia Pasifik. Masalah keamanan pun menjadi perhatian penting bagi AS, terutama terhadap kondisi yang dianggap dapat mengganggu kelangsungan investasi dan produksi AS di Indonesia. Oleh karena itu, AS seringkali melibatkan diri pada permasalahan yang terjadi di Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi politik sebagai bagian dari politik luar negeri AS terhadap lingkungan regional.

Dalam kerangka kerjasama regional yang lebih luas, hubungan pertahanan keamanan AS-Indonesia juga terlihat erat. Kerjasama dalam payung regional tersebut merupakan suatu elemen komplementer dalam hubungan bilateral mereka. Sejak tahun 1977, misalnya AS dan Indonesia secara bersama-sama sudah terlibat aktif dalam forum dialog AS-ASEAN.⁵⁹ Dimana dalam forum tersebut membahas masalah keamanan regional di Asia Tenggara. Dalam perkembangannya lebih lanjut, forum tersebut bahkan semakin diperluas yaitu dengan dibentuknya ASEAN Regional Forum (ARF) di Singapura pada tahun 1993. Melalui wadah ini, baik

⁵⁸ Bantarto Bandoro, Indonesia dan Negara-Negara Besar dalam Refleks Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia, Jakarta CSIS, 1990. hal 991-992

⁵⁹ Gary Schuman dan Clara Juwono, Hubungan Indonesia Amerika Serikat : Sebuah Laporan CSIS, Jakarta ; 1990, hal 31

Indonesia maupun Amerika tercatat sebagai negara anggota yang membahas berbagai masalah keamanan regional di Asia Pasifik.

Meskipun demikian, hubungan baik AS-Indonesia di bidang pertahanan keamanan di atas pada kenyataannya bukan tanpa konflik. Hubungan kedua negara yang pada awalnya relatif lancar, mulai dihadapkan pada permasalahan yang terkait erat dengan situasi keamanan yang terjadi di Timor-Timur pasca jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1990. Jajak pendapat yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia sebenarnya merupakan suatu upaya damai untuk menyelesaikan persoalan Timor-Timur untuk memilih diantara 2 opsi yang ditawarkan, yaitu antara menerima tawaran pemberian status khusus Timor-Timur dengan status otonomi luas atau memilih sebagai wilayah merdeka. Namun demikian, pada kenyataannya proses penyelesaian secara damai tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kelompok pro-integrasi yang kalah dalam jajak pendapat tersebut merasa tidak puas dengan hasil jajak pendapat yang dimenangkan secara telak oleh kelompok pro kemerdekaan dengan perbandingan antara 22 : 78 persen. Ketidakpuasaan kelompok pro-integrasi ini kemudian telah menimbulkan situasi keamanan yang sangat serius di Timor-Timur. Aksi bumi hangus, kekerasan, pembunuhan, penculikan dan pengungsian massal adalah beberapa hal yang dapat disebutkan.

Akibat dari kejadian tersebut, Amerika Serikat menganggap hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Bahkan pemerintah Indonesia dituduh dan dipersalahkan atas apa yang terjadi pada krisis Timor-Timur pasca jajak pendapat tersebut. Selain dinilai berpihak pada kelompok pro-integrasi, pemerintah Indonesia juga dianggap bertindak lamban dan tidak mampu menyelesaikan kekacauan politik dan keamanan di Timor-Timur.

Amerika Serikat yang sering mengaitkan kebijakan luar negerinya terhadap negara lain

11. HAM menilai Indonesia melakukan

pelanggaran HAM yang berat serta mengklaim pihak militer Indonesia terlibat. Karenanya, pemerintah Amerika Serikat melalui menteri Pertahanan dan keamanan waktu itu, William Cohen, pada tanggal 9 September 1999 menjatuhkan embargo militernya berupa penghentian program IMET (International Military Education Training) untuk perwira militer Indonesia, pelarangan penjualan berbagai jenis senjata baik yang mematikan maupun tidak mematikan, suku cadang pesawat tempur serta non tempur dan peralatan militer lainnya ke Indonesia berdasarkan resolusi nomor 91 yang dikeluarkan oleh Kongres Amerika Serikat. Pemerintah AS mensyaratkan Indonesia harus mampu menyelesaikan pelanggaran HAM di Timor-Timur serta wilayah lainnya terlebih dahulu jika ingin gabungan militer AS-Indonesia menjadi normal kembali.

Dengan melihat kondisi militer yang melemah akibat embargo serta ketidakpuasan atas embargo senjata yang dijatuhkan pada tahun 1999. Embargo senjata ini membuat pemerintah Indonesia sangat dirugikan dikarenakan selama bekerjasama dengan Amerika, Indonesia merupakan negara konsumen peralatan atau persenjataan militer terbesar di Asia. Sehingga Negara Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Megawati, membuka kerjasama dengan Rusia khususnya di bidang militer berupa pembelian 4 pesawat Sukhoi dan 2 helikopter, terdiri dari 2 pesawat jenis SU-27SK, SU-30mk dan Mi-35P helikopter.

Di saat Indonesia mendapat sorotan tajam mengenai pelanggaran HAM dari masyarakat internasional serta dibukanya kerjasama militer Indonesia-Rusia. Amerika Serikat mengeluarkan sebuah kebijakan untuk memasukkan Indonesia dalam program IMET (International Military Education Training) bersama lebih dari seratus negara lainnya.⁶⁰ AS juga mencabut embargo senjata tak mematikan ke Indonesia dan bantuan dana senilai US\$ 8 juta untuk meneliti, melatih

Indonesia yang akan diberikan melalui program beasiswa pertahanan regional kontra terorisme (*Regional Defence Counter Terrorism Fellowship Program*). Menurut Departemen Luar Negeri AS, melalui kedubes AS di Jakarta, Amerika juga menawarkan program keamanan dan kontra terorisme jangka panjang bernilai lebih dari US\$ 50 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk pelatihan dan bantuan kepada kepolisian sebesar US\$ 31 juta pada tahun fiskal 2001-2003, tambahan peningkatan kemampuan polisi, termasuk pembentukan unit polisi khusus kontra terorisme sebesar US\$ 16 juta pada tahun 2002. Budget tersebut akan didistribusikan pula untuk beasiswa kontra terorisme regional sebesar US\$ 4 juta pada tahun 2002-2003 dan untuk pelatihan serta pendidikan militer sebesar US\$ 400.000 pada tahun 2002.⁶¹ Kebijakan Amerika Serikat ini menandai normalisasi kerjasama militer dengan Indonesia yang terputus sejak tahun 1999 berdasarkan resolusi N0. 91 yang dikeluarkan oleh Kongres.

Bantuan militer Amerika Serikat ini banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak di dalam negeri (Indonesia), terutama dari ormas Islam serta LSM yang konsern terhadap masalah penegakan HAM, diantaranya adalah PHBI, KONTRAS, INFID (*International Forum on Indonesia Development*) dan FLSAM (Lembaga Studi Advokasi Masyarakat). Mereka mengkhawatirkan bantuan militer ini akan membuat aparat keamanan bertindak lebih represif, terutama di daerah rawan konflik serta akan dianggap sebagai dukungan terhadap tindakan represif aparat keamanan.

Jika memperhatikan fenomena diatas, maka kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia mengenai normalisasi kerjasama militer dianggap sangat kontroversial. Karena Amerika Serikat sebagai negara "*super power*" yang mengkonsepsikan peran nasionalnya sebagai "polisi dunia" biasanya sangat memperhatikan masalah penegakan

demokrasi dan HAM dan selalu mengaitkan kedua isu tersebut dalam kebijakan luar negerinya, terutama mengenai bantuan luar negeri, sebagaimana dijatuhkannya embargo militer atas Indonesia yang disebabkan karena penilaian Amerika atas Indonesia yang dianggap telah melakukan pelanggaran HAM berat pada Insiden Dili pasca jajak pendapat 30 Agustus 1999. Lalu mengapa kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk melakukan normalisasi kerjasama militer terhadap Indonesia mengabaikan faktor penyebab dijatuhkannya embargo militer, pelanggaran HAM berat.

D. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka timbullah permasalahan yang akan menjadi pokok kajian pada penulisan skripsi ini, yaitu : **“Apakah faktor yang menyebabkan Amerika Serikat melakuakn normalisasi kerjasama militer dengan pihak Indonesia ?”**

E. Kerangka Dasar Teori.

Pembuatan Kebijakan Luar Negeri (William D. Choplin)

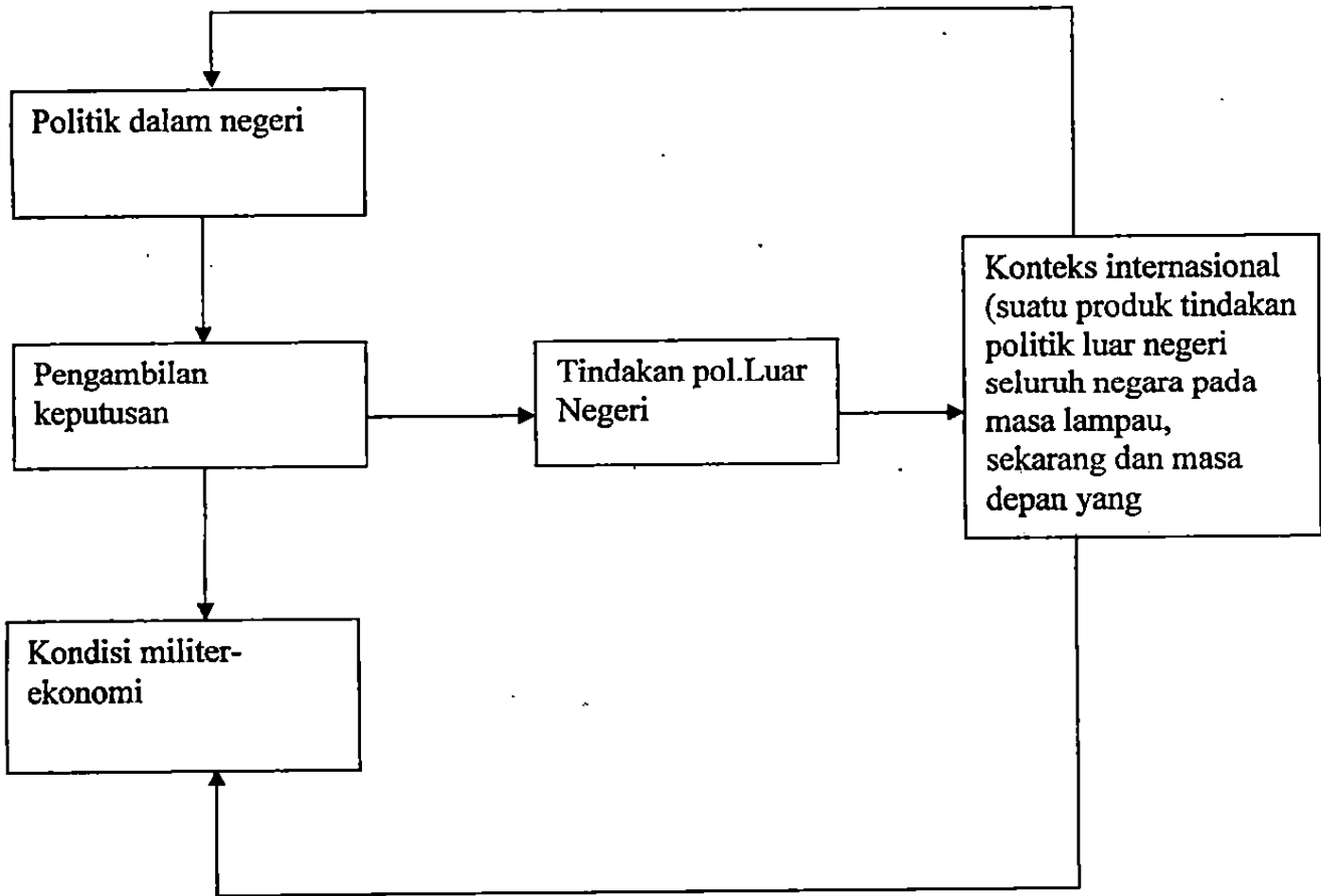
Untuk menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi, penulis akan menguraikan teori proses pembuatan keputusan luar negeri William D. Choplin, yakni apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara—kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membentuk kebijakan luar negerinya dan salah besar jika kita menganggap para pembentuk kebijakan bertindak tanpa pertimbangan.

Sebaliknya politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga faktor yang mempengaruhi para pembuat kebijakan luar negeri itu .⁶²

1. Kondisi politik dalam negeri, termasuk faktor budaya yang mempengaruhi tingkah laku manusianya
 2. Situasi ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan
 3. Konteks Internasional, (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri) serta pengaruh negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi
- Teori Pembuatan kebijakan luar negeri dapat dilihat lebih lanjut berdasarkan.



Tabel/ Gambar di bawah ini



Tabel/gambar I

Sumber : teori pembuatan Kebijakan Luar Negeri yang diungkapkan oleh William D. Choplin dalam buku Introduction to International Politics : A Theoretical Overview (terjemahan M. Marbun), CV, Sinar Bandung, 1992, hal, 30

Dari ketiga faktor tersebut, faktor dominan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri AS berupa normalisasi kerjasama militer terhadap Indonesia adalah kondisi dalam negeri AS. Keputusan yang diambil atau diperlakukan adalah hasil dari permainan tawar-menawar (bargaining) politik yang rumit diantara para pembuat kebijakan luar negeri.

Berakhirnya perang dingin telah membuat mekanisme pengambilan keputusan kebijakan luar negeri semakin condong pada pertimbangan politik dalam negeri AS. Sehingga pengaruh

Kelompok kepentingan, media massa dan kelompok lainnya yang terkondisi oleh dimensi-dimensi budaya politik memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri.

Beberapa ahli politik mengatakan bahwa kelompok kepentingan mendominasi dunia politik di Amerika. Pandangan ini berpegang pada keadaan dimana Kongres dan presiden hanya bertindak sebagai "broker" di antara para kelompok kepentingan yang permintaannya menginisiatifkan *policymaking*. Tetapi juga dianggap melebih-lebihkan kekuatan kelompok kepentingan. Mereka merasa bahwa kebijaksanaan pemerintah lebih dari sekedar "jumlah" permintaan kelompok kepentingan, khususnya dalam meng"arah"kan kebijaksanaan pemerintah.

Sebagai sebuah kelompok kepentingan, MIC (*Military Industrial Complex*) memiliki pengaruh yang sangat kuat di Capitol Hill (Kongres) maupun di pemerintahan. Dengan pergantian pemerintahan di AS yang berasal dari Partai Republik, yaitu George W. Bush terdapat perubahan dalam kebijakan luar negeri AS di Indonesia, yaitu normalisasi kerjasama militer. Kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh kuatnya MIC dalam pemerintahan AS karena para pembantu Bush Jr. Sebagian besar berasal dari kalangan militer serta mantan eksekutif perusahaan kontraktor persenjataan.

Terjadinya tragedi WTC, membuat pemerintah AS berprinsip *zero sum game* dalam merespon gerakan terorisme dengan menciptakan aliansi global dalam perangnya melawan terorisme. Kondisi yang demikian tentu tidak disia-siakan oleh MIC agar pemerintah meningkatkan anggaran pertahanannya. Dikeluarkannya kebijakan pemerintah Bush untuk meningkatkan anggaran pertahanan yang berkaitan erat dengan rencananya untuk merevitalisasi militer, tidak lepas dari kuatnya pengaruh MIC dalam pemerintahan AS. Karena dalam kebijakan

isu yang demikian merupakan momentum yang bagus bagi kebangkitan industri militer AS setelah mengalami penurunan saat berakhirnya perang dingin.

Sebagai negara industri militer terbesar di dunia, pemerintahan Bush menganggap embargo militer yang dijatuhkan oleh pemerintahan Clinton merupakan penghambat bagi kelangsungan industri militernya yang sempat ambruk pada masa pemerintahan Clinton. Kebijakan normalisasi militer dengan Indonesia tidak lepas dari kuatnya lobby industri militer dalam pemerintahan Bush yang khawatir Indonesia akan mengalihkan pembelian senjatanya dari AS karena Indonesia sempat membeli pesawat dari Rusia yaitu pesawat tempur Sukhoi SU-27SK dan SU-30 MK. Kepentingan ini juga sangat berkaitan erat dengan kepentingan AS dalam menciptakan stabilitas keamanan di Indonesia yang mengalami penurunan drastis pasca jatuhnya Soeharto yang disebabkan oleh maraknya konflik antar etnis serta gerakan separatis Aceh dan Irian Jaya (Papua). Instabilitas keamanan di Indonesia dikhawatirkan akan membawa efek domino di negara-negara tetangga di kawasan yang terbukti ketika terjadi kerusuhan sosial politik yang melanda beberapa wilayah di Indonesia selama periode 1997-1999.

F. Hipotesa

Berdasarkan permasalahan yang ada dan didukung oleh kerangka teori yang diterapkan, maka dapat dirumuskan hipotesa dari faktor yang menyebabkan Amerika Serikat melakukan normalisasi kerjasama militer dengan pihak Indonesia adalah karena kuatnya lobi industri militer dalam pemerintahan AS. Serta kekhawatiran pemerintah AS, Indonesia akan mengalihkan

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan terhadap masalah politik luar negeri AS di Indonesia dari tahun 1999 sampai tahun 2006. Diawali dengan dijatuhkannya embargo militer sampai dilakukannya normalisasi kerjasama militer. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam penelitian.

H. Metode Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu tehnik pengumpulan data dengan mencari data-data dari kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan literatur atau referensi baik yang bersumber artikel-artikel, majalah-majalah, surat kabar, jurnal, internet, dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti penulis.

I. Sistematika Penulisan

Sebagai sebuah penulisan deskriptif, penulisan membuat sub-sub pokok yang dapat menguraikan permasalahan untuk dapat menjawab pokok permasalahan diatas.

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Alasan Pemilihan Judul
- B. Tujuan Penelitian
- C. Latar belakang masalah
- D. Perumusan Masalah
- E. Kerangka Teoritis
- F. Hipotesa
- G. Jangkauan Penelitian

logon and login information for various systems. The user has provided a list of systems and their corresponding login details. The information is organized into a table with columns for system name, user name, and password.

The following table lists the systems and their login credentials:

System	User	Password
System 1	user1	password1
System 2	user2	password2
System 3	user3	password3
System 4	user4	password4
System 5	user5	password5

The user has also provided a list of systems and their corresponding login details. The information is organized into a table with columns for system name, user name, and password.

The following table lists the systems and their login credentials:

System	User	Password
System 6	user6	password6
System 7	user7	password7
System 8	user8	password8
System 9	user9	password9
System 10	user10	password10

H. Metode Pengumpulan Data

I. Sistematika Penulisan

BAB II : POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang politik luar negeri Amerika Serikat.

Tentang karakteristik politik luar negeri Amerika Serikat, dasar-dasar politik luar negeri, tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, sarana kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

BAB III : SEJARAH HUBUNGAN AS-INDONESIA

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang sejarah hubungan AS-Indonesia pada umumnya serta hubungan militer antara AS-Indonesia pada khususnya. Disamping itu juga, dijelaskan tentang pemutusan hubungan kerjasama militer AS-Indonesia.

BAB IV : FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA NORMALISASI KERJASAMA MILITER AS-INDONESIA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai faktor penyebab normalisasi